

DIPLOMASI MODERNISASI DAN KEAMANAN REGIONAL DI NEGARA-NEGARA ISLAM

Gesit Yudha,¹ Sunandar Macpal, ² Fachrizal Dwi Nirzawan³

¹UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; gesit@radenintan.ac.id

²IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia; macpal@iaingorontalo.ac.id

³UIN Raden Intan Lampung, Indonesia; fachrizalgawoh22@gmail.com

Article Info	Abstract
<i>Article History</i> Submitted: 24 July 2024 Accepted: 01 May 2025 Published: 01 June 2025 <i>Keywords:</i> Modernization Diplomacy, Regional Security, Islamic Countries <i>Correspondence:</i> gesit@radenintan.ac.id	<i>Islamic countries are currently facing two major strategic issues: modernization and regional security. This study aims to examine the relevance of diplomacy in supporting the modernization agenda and maintaining regional security in Islamic countries. The method used is a literature study with a descriptive-analytical methodology and utilizing a critical approach theoretical framework to examine issues such as diplomatic modernization and regional security. The results of the study show that Modernization and regional security are two interrelated and crucial concepts in the development of Islamic countries. Effective modernization encourages regional stability, while regional security is a prerequisite for poverty development. Diplomatic modernization focuses on access to technology, investment, and resources to accelerate economic transformation, while regional security diplomacy builds cooperation in facing threats such as terrorism and conflict. Islamic countries face challenges such as political tensions and technological change, but through this strategic diplomacy, they can turn challenges into development opportunities. Case studies in the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia, and Qatar show the effectiveness of the approach in encouraging sustainable development and maintaining regional stability.</i> Negara-negara Islam kini tengah menghadapi dua isu strategis utama: modernisasi dan keamanan regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi diplomasi dalam mendukung agenda modernisasi dan menjaga keamanan regional di negara-negara Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan metodologi deskriptif-analitis dan memanfaatkan kerangka teoritis pendekatan kritis terhadap menelaah isu-isu seperti diplomasi modernisasi dan keamanan regional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Modernisasi dan keamanan regional merupakan dua konsep yang saling terkait dan krusial dalam pembangunan negara-negara Islam. Modernisasi yang efektif mendorong stabilitas wilayah, sementara keamanan regional menjadi prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan. Diplomasi modernisasi berfokus pada akses teknologi, investasi, dan sumber daya untuk mempercepat transformasi ekonomi, sedangkan diplomasi keamanan regional membangun kerja sama dalam menghadapi ancaman seperti terorisme dan konflik. Negara-negara Islam menghadapi tantangan seperti ketegangan

	politik dan perubahan teknologi, namun melalui strategi diplomasi ini, mereka mampu mengubah tantangan menjadi peluang pembangunan. Studi kasus pada Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi, dan Qatar menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjaga stabilitas kawasan.
--	---

PENDAHULUAN

Modernisasi dan keamanan regional merupakan dua isu strategis yang semakin mendesak dalam konteks negara-negara Islam kontemporer. Dalam perspektif politik Islam, urusan keamanan dan pertahanan merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang adil dan bermartabat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, kerjasama lintas komunitas telah menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan bersama.¹

Modernisasi di negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, Arab Saudi telah meluncurkan Visi 2030 yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Namun, meskipun terdapat upaya modernisasi, tantangan keamanan tetap menjadi isu utama di kawasan ini. Konflik bersenjata, ketegangan sektarian, dan intervensi asing terus menghambat stabilitas regional.² Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan perubahan tatanan geopolitik, banyak negara Islam berlomba melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing mereka di bidang ekonomi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Menurut laporan *Global Competitiveness Index 2023* dari World Economic Forum, beberapa negara Islam seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mencatat kemajuan signifikan dalam indeks infrastruktur dan efisiensi pasar tenaga kerja, namun sebagian besar lainnya masih tertinggal, terutama di kawasan Sub-Sahara dan Asia Selatan.³ Ketegangan antara negara-negara Islam di Timur Tengah semakin meningkat, terutama antara Arab Saudi dan

¹ Gesit Yudha, *Diakronik Politik Islam: Historis dan Faktual* (Yogyakarta: CV. Eureka Media Aksara, 2024).

² Ji Zeng & Mohsen Bagheri Enayatulloh Yazdani, « A critical approach to security in the Middle East: towards sustainable security » 4, n° 3 (2025).

³ Arsyad Sobby Kesuma, *Peer Review Islam Dan Politik Pemerintahan* (Analisis, 2013).

Iran. Persaingan geopolitik dan ideologis antara kedua negara ini telah mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan. Sebagai ilustrasi, berikut adalah tabel yang menggambarkan ketegangan antara beberapa negara Islam di Timur Tengah:

Negara 1	Negara 2	Isu Utama	Status Ketegangan
Arab Saudi	Iran	Persaingan komoditas minyak bumi dan sekretarian	Tinggi
Turki	Syuria	Intervensi militer	Sedang
Iran	Yaman	Dukungan terhadap Houti	Tinggi
Qatar	UEA	Dukungan terhadap kelompok Islam	Sedang

Sumber: Analisis berdasarkan laporan ACLED dan Carnegie Endowment.⁴

Modernisasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia berlangsung dalam lingkungan regional yang rentan terhadap ketidakstabilan. Data dari *Global Peace Index 2023* menunjukkan bahwa dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), lebih dari 60% terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik bersenjata atau menghadapi ancaman keamanan internal seperti terorisme dan ekstremisme. Kombinasi antara keinginan untuk maju secara ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas membuat diplomasi menjadi instrumen penting.⁵

Diplomasi modernisasi mengacu pada strategi negara untuk menjalin kerja sama internasional demi memperoleh akses terhadap teknologi, investasi, dan sumber daya pembangunan. Sementara itu, diplomasi keamanan regional melibatkan pembentukan aliansi strategis, kerja sama pertahanan, dan peran aktif dalam forum multilateral guna menciptakan ketahanan kawasan.⁶ Meski peran

⁴ Amr Hamzawy, « How Regional Security Dialogues Can Address the Grim Realities in the Middle East », s. d., <https://carnegieendowment.org/research/2025/04/regional-security-middle-east-israel-iran?lang=en&utm>.

⁵ Dina Puspita Plehanku, « Peran Diplomasi Publik Dalam Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia - Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) », *Global Insight Journal* 1, n° 2 (2017).

⁶ Afryan Wahyu, « Strategi Dpw Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung », *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

diplomasi dalam isu-isu ini telah dibahas dalam sejumlah kajian namun masih sedikit studi yang secara holistik mengkaji keterkaitan simultan antara diplomasi modernisasi dan diplomasi keamanan regional dalam konteks negara-negara Islam secara komparatif dan tematik.⁷

Kajian ilmiah terdahulu Gesit Yudha⁸, Hemz Saukat Ali⁹ telah membahas aspek perdagangan dan sejarah ekonomi dalam hubungan internasional negara-negara Islam. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam mengkaji hubungan antara upaya modernisasi dan diplomasi keamanan regional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana diplomasi modernisasi dapat berkontribusi terhadap stabilitas keamanan di negara-negara Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana diplomasi digunakan oleh negara-negara Islam untuk mencapai tujuan modernisasi dan menjaga stabilitas keamanan regional secara bersamaan. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: "Sejauh mana peran diplomasi mendukung agenda modernisasi dan keamanan regional negara-negara Islam, serta strategi apa yang terbukti paling efektif dalam mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut?" Penelitian ini penting karena banyak negara Islam menghadapi dilema kebijakan antara modernisasi yang cepat dan stabilitas jangka panjang. Dengan menganalisis pengalaman beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki, artikel ini berupaya mengisi celah kajian dengan pendekatan analitis yang menghubungkan dua ranah diplomasi tersebut secara simultan. Harapannya, temuan dari kajian ini dapat memberikan landasan konseptual dan praktis dalam merancang kebijakan luar negeri negara-negara Islam ke depan yang lebih adaptif terhadap tantangan global dan regional.

⁷ Haydar Hilmi Maulana, « Analisis Diplomasi Stadion China Di Era Xi Jinping » (Universitas Islam Indonesia, 2023). », *Universitas Islam Indonesia*, 2023.

⁸ Isti Arini Gesit Yudha, Abdul Aziz, « History of Economic Trade in Islam and Its Influence on International Relations Policy in the Arabian Peninsula », *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2024, 96-107.

⁹ Hemz Saukat Ali, « SAUDI-IRANIAN RAPPROCHEMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SECURITY AND STABILITY OF THE MIDDLE EAST: A CASE STUDY OF YEMEN AND SYRIA », *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam isu diplomasi modernisasi dan keamanan regional dalam konteks negara-negara Islam. Analisis ini didasarkan pada kerangka pendekatan kritis yang memfokuskan pada dinamika struktur global, relasi kuasa, serta tantangan internal dan eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Islam. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku rujukan utama seperti *Theories of International Relations* karya Scott Burchill dkk., *The Modern Middle East: A Political History since the First World War* oleh Mehran Kamrava, dan *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism* oleh Charles Tripp, serta dokumen resmi diplomatik seperti Vision 2030 Arab Saudi dan strategi kebijakan luar negeri dari Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, seperti *Middle East Policy*, *Journal of International Affairs*, *Contemporary Arab Affairs*, dan *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, serta artikel akademik yang tersedia di basis data Scopus dan Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan kebijakan, dan literatur akademik yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui proses koding tematik, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti strategi diplomasi, modernisasi ekonomi, dan kerja sama keamanan regional. Kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi kritis terhadap temuan data dan keterkaitannya dengan teori serta realitas empiris di negara-negara yang menjadi studi kasus, seperti Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi, dan Qatar.

HASIL PEMBAHASAN

Kondisi regional di Timur Tengah Penelitian kondisi regional di Timur Tengah dalam kaitannya dengan komponen keamanan berkelanjutan sangat penting

karena dapat membantu memahami situasi keamanan berkelanjutan di kawasan ini. Bagian berikut membahas komponen terpenting yang menunjukkan kurangnya keamanan berkelanjutan di Timur Tengah.

A. Peran Diplomasi Mendukung Agenda Modernisasi Dan Keamanan Regional Negara-Negara Islam

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi masyarakat dari kondisi tradisional menuju kondisi modern, yang mencakup perubahan di bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sistem pemerintahan. Di sisi lain, keamanan regional adalah kondisi stabilitas dan ketiadaan ancaman terhadap eksistensi negara-negara dalam satu kawasan. Kedua konsep ini memiliki relasi timbal balik: modernisasi yang berhasil dapat memperkuat keamanan regional, namun proses modernisasi juga berpotensi memunculkan instabilitas baru.¹⁰

Situasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menunjukkan adanya tekanan keamanan regional yang sangat intens. Masalah keamanan yang berkisar dari perang sipil hingga perselisihan wilayah dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Aljazair: Kerusuhan Islamis dan terorisme, perdagangan manusia
2. Libya: Perang sipil dan ISIS
3. Mesir: Represi, masalah perbatasan, kelompok Islamis, perang di Sinai, konflik Israel vs. Palestina di Gaza dan Tepi Barat, isu-isu keamanan di Sinai (masalah keamanan dan kelompok Salafi)
4. Israel: Gaza (Hamass), Sinai (Mesir, Hamass), Otoritas Palestina/Tepi Barat, Suriah (Dataran Tinggi Golan), Iran (dukungan Iran terhadap Hizbullah, Hamass, Houthi, dan Gerakan Jihad Islam di Palestina), Mesir dan Yordania (konflik Arab–Israel terkait Palestina), Turki (perselisihan mengenai penanganan isu Palestina), dan Amerika Serikat (perbedaan minor mengenai isu seperti pemukiman di Tepi Barat)

¹⁰ Haydar Hilmi Maulana, « Analisis Diplomasi Stadion China Di Era Xi Jinping », *Universitas Islam Indonesia*, 2023.

5. Lebanon: Pertarungan antar sekte, Hizbullah vs. militer nasional, bentrokan di perbatasan (serta kelompok ekstremis seperti Front Al-Nusra)
6. Suriah: ISIS, perang sipil, Kurdi, Turki, kepentingan Iran dan Rusia di Suriah serta aliansi mereka, konflik dengan Barat dan Amerika Serikat
7. Yordania: Ketegangan internal, pengungsi, konflik Israel-Palestina, konflik politik dengan Suriah dan Irak
8. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan UEA: Konflik politik dan kadang wilayah dengan Iran, ISIS/AQAP, Irak, Suriah, konflik Sunni-Syiah, perpecahan internal, serta pemotongan pendapatan minyak sebesar 40–60%
9. Iran: Ancaman dari negara-negara Arab, masalah etnis internal dengan kelompok Baluchi dan Arab vs. ekspansi pengaruh regional, kemampuan misil, misil laut-udara asimetris, dan kemampuan nuklir
10. Yaman: Perang sipil, Houthi, mantan Presiden Saleh, konflik teritorial dan politik dengan Arab Saudi dan UEA, keterlibatan Iran, AQAP, ISIS.¹¹

Penilaian terhadap situasi keamanan di negara-negara Timur Tengah, dengan mempertimbangkan berbagai konflik dan perselisihan di tingkat sub-nasional dan nasional dengan negara lain serta aktor non-negara seperti kelompok teroris, menunjukkan bahwa seluruh negara di kawasan ini menghadapi masalah keamanan internal dan eksternal. Akibatnya, negara-negara tersebut tidak mampu menciptakan tingkat keamanan yang diinginkan serta tidak mampu mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.

Hampir semua negara Timur Tengah yang kaya minyak bergantung pada pendapatan minyak, mulai dari Arab Saudi hingga negara-negara di Teluk Persia. Negara-negara lain yang tidak memiliki sumber daya minyak besar seperti Mesir dan Yaman bergantung pada pendapatan dari para pekerja yang bekerja di industri minyak negara-negara tetangga. Dalam ekonomi rente, terdapat hubungan implisit antara bahan mentah dan sumber daya alam (seperti minyak) dengan ketenangan politik. Hal ini terjadi karena negara merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan

¹¹ Serge Strobants, « Terrorism in the Middle East and North African region. In Handbook of security science », *Masys, A.J. Springer*, 2022.

kebijakannya kepada rakyat selama mereka memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Bahkan kelompok oposisi politik pun turut menikmati keuntungan dari pendapatan tersebut sehingga mereka tetap mengikuti partai penguasa. Hasilnya adalah ketenangan politik yang menyeluruh. Namun demikian, penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir, yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an, telah menurunkan standar hidup di banyak negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, negara-negara tersebut menjadi tidak mampu meningkatkan standar hidup generasi muda yang akan segera mencapai usia dewasa dengan harapan hidup yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya.¹² Karena ketidakmampuan negara memenuhi harapan-harapan tersebut, para pemuda cenderung bergabung dengan gerakan oposisi atau radikal.¹³

Terkait dampak rente minyak terhadap stabilitas negara-negara di Timur Tengah, respons rezim-rezim Arab terhadap Arab Spring dapat dijadikan contoh. Studi menunjukkan bahwa revolusi Arab, selain yang terjadi di Libya (dengan kondisi khusus dan intervensi asing), hanya berhasil di negara-negara yang tidak menerima rente minyak, yaitu Tunisia dan Mesir. Sebaliknya, negara-negara kaya minyak yang memiliki sumber daya dan pendapatan dari minyak mampu mencegah ketidakstabilan dan melanjutkan pemerintahan otoriter mereka. Sebagai contoh, pemerintah Bahrain dan Kuwait masing-masing memberikan dana sebesar \$2.640 per rumah tangga dan \$3.580 per warga negara sebagai respons terhadap unjuk rasa. Di Libya, rezim Gaddafi segera menanggapi protes dengan membentuk dana perumahan sebesar \$24 miliar. Kerajaan Arab Saudi menghabiskan lebih dari \$100 miliar untuk layanan sosial. Sebaliknya, beberapa rezim seperti Libya menindas protes secara brutal, bahkan negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab turut campur tangan di Bahrain untuk menekan para demonstran dengan kekerasan.

Modernisasi merupakan proses transformasi sosial dan ekonomi yang membawa masyarakat dari kondisi tradisional menuju tatanan modern. Perubahan

¹² Patrick Clawson, « Changing population patterns will reshape the Middle East. », *The Washington Institute for Near*, 2022.

¹³ Nora Bensahel, « Political reform in the Middle East. In The future security environment in the Middle East: Conflict, stability, and political change », RAND Corporation, 2004.

ini meliputi bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, budaya, serta sistem pemerintahan dan infrastruktur. Dalam konteks negara-negara Islam, modernisasi seringkali dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global. Namun, proses ini tidak terlepas dari tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, gejolak sosial, dan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

Di sisi lain, keamanan regional merupakan kondisi stabil dan damai yang dicapai melalui kerja sama antarnegara, pengelolaan konflik secara damai, serta upaya pencegahan terhadap berbagai ancaman seperti konflik bersenjata, terorisme, dan ekstremisme. Dalam wilayah-wilayah yang didominasi negara-negara Islam, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), isu keamanan regional menjadi sangat kompleks. Konflik berkepanjangan, rivalitas sektarian, campur tangan kekuatan asing, dan ketegangan antar negara memperburuk kondisi stabilitas kawasan.

Relasi antara modernisasi dan keamanan regional bersifat timbal balik. Modernisasi yang berhasil dapat memperkuat stabilitas regional dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperluas akses terhadap pendidikan dan teknologi. Sebaliknya, instabilitas regional dapat menghambat proses modernisasi karena menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi pembangunan dan investasi. Oleh karena itu, keamanan regional menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan modernisasi yang berkelanjutan.

Ketegangan ini menyebabkan kawasan tersebut sulit membangun fondasi kerja sama jangka panjang. Padahal, keberhasilan menciptakan keamanan regional yang inklusif dan kolaboratif akan mendukung integrasi ekonomi, pertukaran budaya, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam konteks negara-negara Islam, stabilitas kawasan sangat penting agar fokus pembangunan internal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung di antara negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah menghambat terwujudnya kerja sama jangka panjang yang berorientasi pada perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Padahal, keberhasilan dalam menciptakan keamanan regional yang

inklusif dan kolaboratif akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya integrasi ekonomi, pertukaran budaya, dan pembangunan infrastruktur lintas negara secara konsisten.¹⁴

Diplomasi dalam konteks negara-negara Islam telah mengalami transformasi dari pendekatan berbasis ideologi dan konflik menjadi pendekatan pragmatis yang menekankan pada stabilitas kawasan dan pembangunan ekonomi. Negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, misalnya, telah menunjukkan bagaimana diplomasi ekonomi dan investasi lintas kawasan dapat mereduksi ketegangan dan memperluas pengaruh regional sambil tetap mendorong agenda modernisasi domestik.¹⁵

Negara-negara Islam memanfaatkan diplomasi bilateral dan multilateral dalam mendukung program modernisasi sekaligus menjaga stabilitas keamanan domestik dan regional. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah strategi diplomatik yang akan dievaluasi, yaitu diplomasi ekonomi melalui kerja sama investasi dan pembangunan, seperti partisipasi negara-negara Islam dalam inisiatif Belt and Road Tiongkok; dialog regional multilateral yang difasilitasi oleh lembaga seperti Gulf Cooperation Council (GCC) dan Organization of Islamic Cooperation (OIC); soft diplomacy berbasis budaya dan agama untuk membangun solidaritas keislaman yang inklusif tanpa memicu konflik sektarian; serta strategi keamanan kolektif dengan membentuk mekanisme peringatan dini konflik dan memperkuat kapasitas pertahanan kawasan secara non-konfrontatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana diplomasi modern tidak hanya menjadi instrumen politik luar negeri, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam mengintegrasikan agenda pembangunan dan stabilitas regional di negara-negara Islam.

¹⁴ Gilbert Achcar, « The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising », *University of California Press*, 2002.

¹⁵ Mehran Kamrava, « Qatar's Diplomacy and Regional Influence: Balancing Modernization with Security », *Middle East Policy* 28, n° 3 (2023).

B. Relevansi Diplomasi Modernisasi dan Keamanan bagi Negara-Negara Islam

Negara-negara Islam di abad ke-21 menghadapi serangkaian tantangan struktural dan dinamis yang saling terkait, mulai dari ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap komoditas tunggal, konflik bersenjata yang berkepanjangan, hingga tekanan geopolitik dari kekuatan global dan regional. Tantangan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas institusi negara dalam sebagian besar kawasan, termasuk di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Asia Selatan. Dalam menghadapi kondisi ini, diplomasi modernisasi dan keamanan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional dan stabilitas kawasan. Diplomasi tidak hanya menjadi sarana untuk menjalin hubungan bilateral atau multilateral, tetapi juga menjadi instrumen untuk membentuk ulang struktur hubungan internasional yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan negara-negara berkembang, termasuk dunia Islam.¹⁶

Salah satu pendekatan utama yang muncul dalam literatur adalah pentingnya integrasi antara agenda modernisasi ekonomi dan stabilisasi keamanan regional. Menurut Hinnebusch (2014), keberhasilan diplomasi ekonomi di kawasan MENA sangat tergantung pada legitimasi domestik dan kualitas tata kelola pemerintahan.¹⁷ Negara-negara dengan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel cenderung lebih mampu menarik investasi asing, menjaga kepercayaan publik, dan membangun kredibilitas di mata komunitas internasional. Hal ini diperkuat oleh laporan World Bank (2020), yang menunjukkan korelasi kuat antara kestabilan politik dan peningkatan arus Foreign Direct Investment (FDI).¹⁸

¹⁶ and Firda Nuzulia Syaiful Anwar, Lasmono Lasmono, « Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012- 2017) », *Strategi Perang Semesta* 4, n° 1 (2018).

¹⁷ Ahmad Zainal Mustofa, « Kepentingan China Sebagai Aktor Di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi Dan Iran », *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2023.

¹⁸ Viki Syahril, « Normalisasi Hubungan Diplomatik Bahrain Dan Israel Di Tahun 2020 Pada Masa Pemerintahan », *universitas indonesia*, 2022.

Lebih lanjut, diplomasi modernisasi memungkinkan negara-negara Islam untuk memperkuat konektivitas ekonomi, berbagi teknologi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di kawasan. Model-model kerja sama seperti Gulf Cooperation Council (GCC) dan Organization of Islamic Cooperation (OIC) menunjukkan potensi diplomasi kolektif dalam menjawab tantangan pembangunan bersama.¹⁹ Namun, keberhasilan inisiatif-inisiatif ini sangat tergantung pada komitmen politik anggota dan kesediaan untuk meletakkan kepentingan kolektif di atas agenda nasional sempit. Diplomasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan ideologis antarnegara Islam yang sering kali menghambat integrasi regional.²⁰

Dalam konteks keamanan, diplomasi memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan militer. Melalui platform dialog dan mediasi, negara-negara Islam dapat mengurangi ketegangan, membangun mekanisme pencegahan konflik, dan memperkuat kerja sama keamanan kolektif.²¹ Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, aspek keamanan juga meluas ke ranah non-konvensional seperti ancaman siber, disinformasi, dan manipulasi data. Oleh karena itu, diplomasi digital dan siber menjadi agenda baru yang harus segera diintegrasikan dalam strategi keamanan nasional dan regional negara-negara Islam.²²

Dari perspektif penulis, diplomasi modernisasi dan keamanan harus didesain tidak hanya untuk kepentingan berbagai negara, tetapi juga harus melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Dengan demikian, proses diplomasi dapat bersifat partisipatif,

¹⁹ Hana Nada Nadhifah, « Diplomasi Siber Indonesia Dalam United Nations Group of Governmental Experts on Developments In The Field of Information And Telecommunications In The Context of International Security 2012-2019 », *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

²⁰ Yanti Nianti, « Analisis Implementasi Diplomasi Budaya Tiongkok Melalui Confucius Institute Di Indonesia », *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.

²¹ Gesit Yudha Puji Arsono, « Persaingan Politik Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2014 Lampung », *Universitas Lampung*, 2015.

²² Ziyad Falahi, « Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah », *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2013.

transparan, dan lebih representatif terhadap aspirasi masyarakat.²³ Selain itu, negara-negara Islam perlu melakukan investasi besar dalam pendidikan diplomatik, pelatihan negosiator, dan peningkatan kapasitas lembaga luar negeri agar mampu bersaing dalam arena global yang semakin kompetitif. Tanpa sumber daya manusia yang andal dan visi yang kuat, diplomasi akan sulit berfungsi secara maksimal sebagai instrumen perubahan.²⁴

KESIMPULAN

1. Hubungan antara modernisasi dan keamanan regional di negara-negara Islam bersifat dua arah dan kompleks. Modernisasi bukan hanya berpotensi memperkuat stabilitas regional, tetapi juga dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan dan tata kelola yang inklusif. Begitu pula, keamanan regional merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proses modernisasi, terutama dalam konteks kawasan yang rawan konflik seperti Timur Tengah. Kesimpulan ini menekankan pentingnya tidak hanya memahami keterkaitan konseptual, tetapi juga dinamika praktis dan risiko dari masing-masing strategi pembangunan.
2. Diplomasi modernisasi dan keamanan regional sejauh ini terbukti sebagai instrumen strategis yang efektif dalam mendorong transformasi dan menjaga stabilitas di sejumlah negara Islam. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas negara, keberlanjutan kebijakan luar negeri, serta kemampuan membangun kepercayaan regional. Contoh dari UEA, Turki, dan Arab Saudi menunjukkan adanya model-model keberhasilan parsial yang bisa menjadi acuan, tetapi juga perlu dikritisi dalam konteks kesenjangan sosial, otoritarianisme, atau intervensi militer yang justru bisa mengganggu stabilitas jangka panjang.

²³ Rifka Nurohma, « Dampak Perdamaian Dunia Arab Dan Israel Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Palestina Dan Uea », *Journal of Integrative International Relations*, 2021.

²⁴ Widhistira Ardhiya Pangestu, « Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dengan Prancis Periode 2017-2020 », *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Rekomendasi Kebijakan

1. Negara-negara Islam perlu mengembangkan strategi diplomasi berbasis *inclusive modernization* yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada pembangunan institusi demokratis, keterbukaan politik, dan keadilan sosial.
2. Kerja sama regional hendaknya difokuskan pada penguatan *early warning systems*, forum mediasi permanen, dan mekanisme dialog lintas ideologi serta etnik, untuk mencegah konflik dan memperkuat stabilitas jangka panjang.

Saran penelitian lebih lanjut

1. Perlu dilakukan studi empiris yang mendalam mengenai efektivitas diplomasi modernisasi dalam konteks negara-negara Islam dengan karakteristik politik yang berbeda (monarki vs republik).
2. Penelitian ke depan dapat mengeksplorasi bagaimana diplomasi keamanan dapat dijalankan oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam mendorong perdamaian regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achcar, Gilbert. « The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising ». *University of California Press*, 2002.
- Ali, Hemz Saukat. « SAUDI-IRANIAN RAPPROCHEMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SECURITY AND STABILITY OF THE MIDDLE EAST: A CASE STUDY OF YEMEN AND SYRIA ». *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2023.
- Arsono, Gesit Yudha Puji. « Persaingan Politik Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2014 Lampung ». *Universitas Lampung*, 2015.
- Arsyad Sobby Kesuma. *Peer Review Islam Dan Politik Pemerintahan*. Analisis, 2013.
- Bensahel, Nora. « Political reform in the Middle East. In The future security environment in the Middle East: Conflict, stability, and political change ». RAND Corporation, 2004.
- Clawson, Patrick. « Changing population patterns will reshape the Middle East. » *The Washington Institute for Near*, 2022.

- Enayatulloh Yazdani, Ji Zeng & Mohsen Bagheri. « A critical approach to security in the Middle East: towards sustainable security » 4, n° 3 (2025).
- Falahi, Ziyad. « Signifikansi Diplomasi Islam Moderat Era Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merespon Problem Keamanan Timur Tengah ». *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 2013.
- Gesit Yudha, Abdul Aziz, Isti Arini. « History of Economic Trade in Islam and Its Influence on International Relations Policy in the Arabian Peninsula ». *Jurnal Tapis Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2024, 96-107.
- Hamzawy, Amr. « How Regional Security Dialogues Can Address the Grim Realities in the Middle East », s. d.
<https://carnegieendowment.org/research/2025/04/regional-security-middle-east-israel-iran?lang=en&utm>.
- Kamrava, Mehran. « Qatar's Diplomacy and Regional Influence: Balancing Modernization with Security ». *Middle East Policy* 28, n° 3 (2023).
- Maulana, Haydar Hilmi. « Analisis Diplomasi Stadion China Di Era Xi Jinping » (Universitas Islam Indonesia, 2023). » *Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- . « Analisis Diplomasi Stadion China Di Era Xi Jinping ». *Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Mustofa, Ahmad Zainal. « Kepentingan China Sebagai Aktor Di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi Dan Iran ». *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2023.
- Nadhifah, Hana Nada. « Diplomasi Siber Indonesia Dalam United Nations Group of Governmental Experts on Developments In The Field of Information And Telecommunications In The Context of International Security 2012-2019 ». *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Nianti, Yanti. « Analisis Implementasi Diplomasi Budaya Tiongkok Melalui Confucius Institute Di Indonesia ». *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.
- Nurohma, Rifka. « Dampak Perdamaian Dunia Arab Dan Israel Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Palestina Dan Uea ». *Journal of Integrative International Relations*, 2021.
- Pangestu, Widhistira Ardhiya. « Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dengan Prancis Periode 2017-2020 ». *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Plehanku, Dina Puspita. « Peran Diplomasi Publik Dalam Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia - Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) ». *Global Insight Journal* 1, n° 2 (2017).
- Stroobants, Serge. « Terrorism in the Middle East and North African region. In Handbook of security science ». *Masys, A.J. Springer*, 2022.
- Syahrijal, Viki. « Normalisasi Hubungan Diplomatik Bahrain Dan Israel Di Tahun 2020 Pada Masa Pemerintahan ». *universitas indonesia*, 2022.

Syaiful Anwar, Lasmono Lasmono, and Firda Nuzulia. « Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat (2012- 2017) ». *Strategi Perang Semester* 4, n° 1 (2018).

Wahyu, Afryan. « Strategi Dpw Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung ». *UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

Yudha, Gesit. *Diakronik Politik Islam: Historis dan Faktual*. Yogyakarta: CV. Eureka Media Aksara, 2024.